

JAWA POS

RADAR MADIUN

RADAR MAGETAN

Rabu, 30 Maret 2022

--Bupati Menulis--



Oleh: Suprawoto
(Bupati Magetan)

Kalau Presiden "Duka Yayah Sinipi"

SEBAGAI bupati, saya sudah beberapa kali mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di berbagai acara. Baik luring maupun daring. Hanya dua kali presiden betul-betul marah besar. Pertama saat Rakornas Kabinet Indonesia Maju bagi Pemerintah Pusat dan Forkompimda, 13 November 2019 di Sentul, Bogor.

Tak tanggung-tanggung, yang diundang dan hadir adalah seluruh anggota kabinet, gubernur, bupati/wali kota, dan anggota forkompimda di seluruh Indonesia. Dalam arahnya, presiden risau dengan perkembangan investasi. Banyak yang ingin berinvestasi, tapi realisasi rendah. Pasti ada yang tidak benar dalam perizinan. Iklim investasi masih kalah dengan Vietnam dan Thailand.

Ketika itu, presiden menyampaikan bahwa pemerintah memiliki sejumlah agenda besar untuk lima tahun ke depan. Yakni, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, serta menurunkan impor. "Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri," tutur presiden sambil menggigit bibir. Beliau tampak sangat marah.

Presiden juga menyampaikan ultimatum khusus kepada instansi penegak hukum agar tidak bermain-main dengan pejabat atau pelaku bisnis yang berinovasi. "Jangan pernah menggigit pejabat atau pelaku bisnis yang berinovasi untuk kemajuan negara," lanjutnya.

Ultimatum tersebut ditegaskan presiden supaya pemerintah daerah tidak takut berinovasi. Apalagi untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia. Agar semua tutup mata, demi kebaikan investasi dalam negeri. Juga untuk pengurangan impor. Ekspor barang jadi, juga harus terus didorong.

Sebagai orang Jawa, saya melihat presiden sangat marah. Tidak tergambar raut wajah cerah. Justru sebaliknya. Apalagi pilihan diksi "saya gigit sendiri". Menurut saya --yang dibesarkan dalam budaya Jawa-- ekspresi tersebut menunjukkan rasa kemarahan dan kekesalan.

Berbeda dengan Pak Harto (mantan Presiden RI Suharto). Saat marah Pak Harto masih bisa senyum. Namun, pembantu-pembantu presiden ketika itu sudah bisa menerjemahkan. Ada salah seorang pembantu presiden bercerita: kalau ada perintah "bereskan", maka semua pembantu presiden sudah tahu maksudnya. Kalimat paling keras yang pernah keluar dari mulut Pak Harto yaitu "yen macem-macam tak gebuk."

Kebetulan, 25 Maret lalu, semua menteri, kepala lembaga, BUMN, gubernur, beserta bupati/wali kota dikumpulkan di Bali dalam acara Arahan Presiden kepada Menteri, Lembaga, Kepala Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangsa Buatan Indonesia. Saya pikir kegiatan tersebut lebih untuk menggairahkan wisata di Bali ■

► Baca *Kalau...* Hal.19

Sambungan dari Hal.16

Seperti ketika terjadi bom Bali 2 tahun 2005. Tiga hari setelah kejadian, saya rapat koordinasi di kantor wakil presiden. Salah satu arahan wakil presiden adalah agar wisata tidak terpuruk kembali (seperti akibat bom Bali 1 tahun 2002). Semua kegiatan pemerintah dilaksanakan di Bali. Sekaligus menunjukkan kepada masyarakat dan dunia bahwa kondisi Bali sudah terkendali. Alhamdulillah kondisi wisata berangsur pulih.

Covid-19 memukul sektor wisata. Tidak hanya di Bali. Seluruh dunia terpuruk. Pun sudah lebih dari dua tahun. Ketika Covid-19 mulai terkendali, tentu wisata harus digairahkan kembali. Bali merupakan barometer wisata di Indonesia. Wajar jika Bali harus dihidupkan kembali. Terutama untuk menarik wisman.

Ternyata dugaan saya tidak sepenuhnya benar. Banyak hal yang disampaikan presiden dengan sangat serius, tentang kondisi ekonomi dunia dan posisi Indonesia. Semestinya kita semua harus segera mengambil sikap. Tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Semua harus peka kondisi seperti ini.

Semua negara di dunia saat ini kesulitan ekonomi karena berbagai sebab. Di antaranya, pandemi Covid-19, disrupsi teknologi, juga perang di Ukraina. Akibatnya, semua tidak bisa dihitung secara pasti. Semua negara kebingungan. Ambil contoh minyak mentah pada Januari 2020. Waktu itu harganya USD 61 per barel, saat ini mencapai USD 118.

Kelangkaan kontainer terjadi di berbagai negara. Distribusi barang, terutama pangan, terganggu. Biaya naik enam kali lipat. Harga pangan impor se-

perti kedelai dan gandum naik. Inflasi pun naik. Menurut catatan, inflasi di AS sudah 7,5 persen, Indonesia 2,5 persen, Turki 48 persen.

"Jalan keluarnya, beli buatan dalam negeri," begitu arahan presiden. Belanja pemerintah menjadi *trigger* pertumbuhan ekonomi. Belanja modal cukup besar. Pusat Rp 526,8 triliun, daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun. Jika empat puluh persen saja dibelanjakan untuk produk buatan dalam negeri, maka akan memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7 persen.

"Bodoh sekali kalau tidak kita lakukan," tegas presiden disusul tepuk tangan semua yang hadir. Namun, reaksi presiden melanjutkan. "Jangan tepuk tangan." Presiden kelihatan sangat kesal dan marah. Sebab, jika kita melakukan impor justru akan memberi lapangan pekerjaan bagi

negara lain.

"Kalau barang-barang sudah bisa dibuat di Indonesia, jangan impor. *Masak* komputer, CCTV, alat kesehatan, alat pertanian, beli impor. Apa-apaan." Semua peserta rapat terdiam. Kemudian dilanjutkan, "kalau pimpinan daerah tidak semangat, potong DAK/DAU. Kalau BUMN, Dirutnya ganti. Kalau kementerian, urusan saya. Akan saya ganti."

Semua peserta merenung. Sekali lagi semua tergantung pemerintah pusat untuk mengatur mana yang bisa diimpor dan tidak. Namun, kemarahan presiden tentu pada tempatnya. Sebagai pemegang kendali pemerintahan. Melihat para pembantunya masih kurang peka membaca situasi sesuai arahan. Pemerintah itu "the biggest buyer". Bila itu kita lakukan, kita pasti tidak terpuruk terlalu dalam di situasi seperti ini. (*/*naz/c1)